

SKRIPSI

**Kebijakan Satu Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi
Tentang Integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib
Pajak)**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Malang Sebagai Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

**Kebijakan Satu Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
(Studi Tentang Integrasi Nomor Induk Kependudukan dan
Nomor Pokok Wajib Pajak)**

Diajukan Oleh:

AUDY TRIA LAWIDYA
202010050311137

Telah disetujui
Pada hari Sabtu / tanggal 20 Juli 2024

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing


Drs. Krishno Hadi, M.A


Najamuddin, Khairun Nisa, S.IP., M.Hub.Int.

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

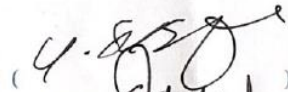


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Audy Tria Lawidya
202010050311137

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Sabtu, 20 Juli 2024
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Yana Syafriyana Hijri, S.IP., M.IP ()
2. Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A ()
3. Drs. Krishno Hadi, M.A ()

Mengetahui
Wakil Dekan  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Nawawudin Khatirul Ujal, S.IP., M.Hub.Int.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Audy Tria Lawidya
NIM : 202010050311137
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Kebijakan Satu Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Mei 2024
Yang Menyatakan


Audy Tria Lawidya



Kampus I

Jl. Semarang 1 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 591 200 (Pusat)
F: +62 341 460 450

Kampus II

Jl. Bunturing Sukani No. 100 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 503 140 (Pusat)
F: +62 341 582 000

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No. 240 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 404 370 (Pusat)
F: +62 341 400 435
E: webmaster@umh.ac.id

HALAMAN CEK PLAGIASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Audy Tria Lawidya
NIM : 202010050311137
Judul TA/Skripsi : Kebijakan Satu Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak)
Pembimbing : Drs. Krishno Hadi, M.A

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	100	400	800	100	300

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd

Malang, 8 Juli 2024

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kebijakan Satu Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Muhammad Kamil, S.IP., M.A. selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Drs. Krishno Hadi, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, kritik, serta saran dalam proses penelitian ini.
5. Muhammad Farid, S.STP., M.Si. selaku Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran.
6. Ir. Diana Anggraeni, M.Si. selaku Kepala Subdirektorat Wilayah IV Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran.
7. Abdul Latib dan Ira Widiawati selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, motivasi, dan mendoakan tanpa henti pada proses penelitian ini.

8. Gusti Lawid Pratama, Meishela Dwi Lawidya, dan Arya Buana Lawidsila selaku saudara penulis yang senantiasa memberi dukungan secara moril maupun materil.
9. Muhammad Salman Jabbar Sangaji selaku seseorang yang kebersamai serta menjadi *partner* bertukar pikiran.
10. Radea Ananda, Titis Hariyani, dan Rafika Diah Lukmasari selaku sahabat penulis yang memberikan semangat, motivasi, serta saling mendoakan dalam menyelesaikan proses penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2020 yang memberikan semangat dan saling mendoakan dalam menyelesaikan proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 23 Juni 2024

Audy Tria Lawidya

Audy Tria Lawidya, 202010050311137, **Kebijakan Satu Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak).**

Dosen Pembimbing: Drs. Krishno Hadi, M.A

ABSTRAK

Sikap ego sektoral masing-masing instansi dalam berbagi data masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Selain itu, banyaknya nomor identitas dengan sistemnya sendiri-sendiri menambah permasalahan seputar data di Indonesia. Dalam rangka mendukung integrasi data, maka pemerintah mengintegrasikan NIK dan NPWP melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Namun data yang terpusat dan terintegrasi di satu sistem berpengaruh terhadap keamanan data, karena lebih banyak data yang dapat diakses dari satu titik kerentanan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan data yang terintegrasi dapat terlindungi dengan baik.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik menurut William N. Dunn. Analisis melalui teori kebijakan publik memungkinkan analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap proses pembuatan kebijakan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan dan mengadopsi solusi yang efektif, mengimplementasikan kebijakan dengan baik, serta melakukan evaluasi untuk memastikan kebijakan integrasi NIK dan NPWP dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan keamanan data pribadi masyarakat.

Hasil penelitian ini menjelaskan pengintegrasian NIK dan NPWP memperhatikan keamanan data dari sisi regulasi dan teknologi. Integrasi ini memungkinkan penggabungan data kependudukan berbasis NIK dan data perpajakan berbasis NPWP, sehingga berimplikasi terhadap peningkatan akurasi data keduanya dan dapat digunakan dalam pelayanan publik khususnya pelayanan perpajakan. Namun, manfaat dari integrasi ini belum sepenuhnya menyentuh berbagai pelayanan dasar lainnya. Dengan demikian, perlu dilakukan perluasan akses data yang valid untuk pelayanan dasar lainnya di samping adanya peningkatan efisiensi administrasi pelayanan perpajakan, serta pemutakhiran sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001 versi tahun 2022.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Satu Data, Integrasi Data, NIK dan NPWP

Audy Tria Lawidya, 202010050311137, *One Data Policy To Improve The Quality of Public Services (Study on The Integration of Population Identification Numbers and Taxpayer Identification Numbers)*.

Supervisor: Drs. Krishno Hadi, M.A

ABSTRACT

The sectoral ego attitude of each agency in sharing data is still a challenge that the government must face. Apart from that, the large number of identity numbers with their own systems adds to the problems surrounding data in Indonesia. In order to support data integration, the government is integrating NIK and NPWP through Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 concerning Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) and Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 concerning NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. However, data that is centralized and integrated in one system has an impact on data security, because more data can be accessed from one point of vulnerability. Therefore, it is important to ensure that integrated data is properly protected.

The method in this research is qualitative research with an empirical juridical approach. This research uses public policy theory according to William N. Dunn. Analysis through public policy theory allows systematic and comprehensive analysis of the policy-making process to identify problems, formulate and adopt effective solutions, implement policies well, and carry out evaluations to ensure that the NIK and NPWP integration policy can achieve its goals without compromising the security of people's personal data. .

The results of this research explain that the integration of NIK and NPWP takes into account data security from a regulatory and technological perspective. This integration allows combining NIK-based population data and NPWP-based tax data, so that it has implications for increasing the accuracy of both data and can be used in public services, especially tax services. However, the benefits of this integration have not fully touched various other basic services. Thus, it is necessary to expand valid data access for other basic services in addition to increasing the efficiency of tax service administration, as well as updating the information security management system based on the 2022 version of ISO/IEC 27001.

Keywords: Public Policy, One Data, Data Integration, NIK and NPWP

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN CEK PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Definisi Konseptual	6
1.5.1 Kebijakan Publik.....	6
1.5.2 Electronic Government (E-Government).....	7
1.5.3 Kualitas Pelayanan Publik di Bidang E-Government	9
1.6 Kerangka Berpikir	10
1.7 Definisi Operasional	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 Jenis Penelitian	12
1.8.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.8.3 Unit Analisis Penelitian.....	12

1.8.4 Jenis dan Sumber Data	13
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.8.6 Teknik Analisis Data.....	14
1.8.7 Waktu dan Lokasi Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kerangka Teori.....	21
2.2.1 Kebijakan Publik	21
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	24
3.1 Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	24
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri	26
3.3.1 Visi Kementerian Dalam Negeri	27
3.3.2 Misi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	27
3.4 Struktur Organisasi	28
3.4.1 Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	28
3.4.2 Struktur Organisasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	29
3.5 Tugas, Pokok, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri.....	30
3.6 Potensi Kementerian Dalam Negeri.....	31
3.7 Sarana dan Prasarana Kementerian Dalam Negeri.....	32
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	34
4.1 Penyusunan Agenda Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP.....	34
4.1.1 Isu Vertikal Dibalik Pengintegrasian NIK dan NPWP	34
4.1.2 Isu Horizontal Dibalik Pengintegrasian NIK dan NPWP.....	38
4.2 Formulasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP	40
4.3 Adopsi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP.....	45
4.4 Implementasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP	48
4.4.1 Kerja Sama Antar Kementerian Dalam Pelaksanaan Kebijakan	49
4.4.2 Keamanan Data Dalam Pelaksanaan Kebijakan	55
4.4.2.1 Regulasi Pengamanan Data.....	55
4.4.2.2 Teknologi Pengamanan Data.....	59
4.4.3 Pemberlakuan NIK Sebagai NPWP Orang Pribadi Penduduk	64

4.4.4 Pelaksanaan Sosialisasi Pemadanan NIK dan NPWP.....	68
4.5 Penilaian Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP	71
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
LAMPIRAN	82



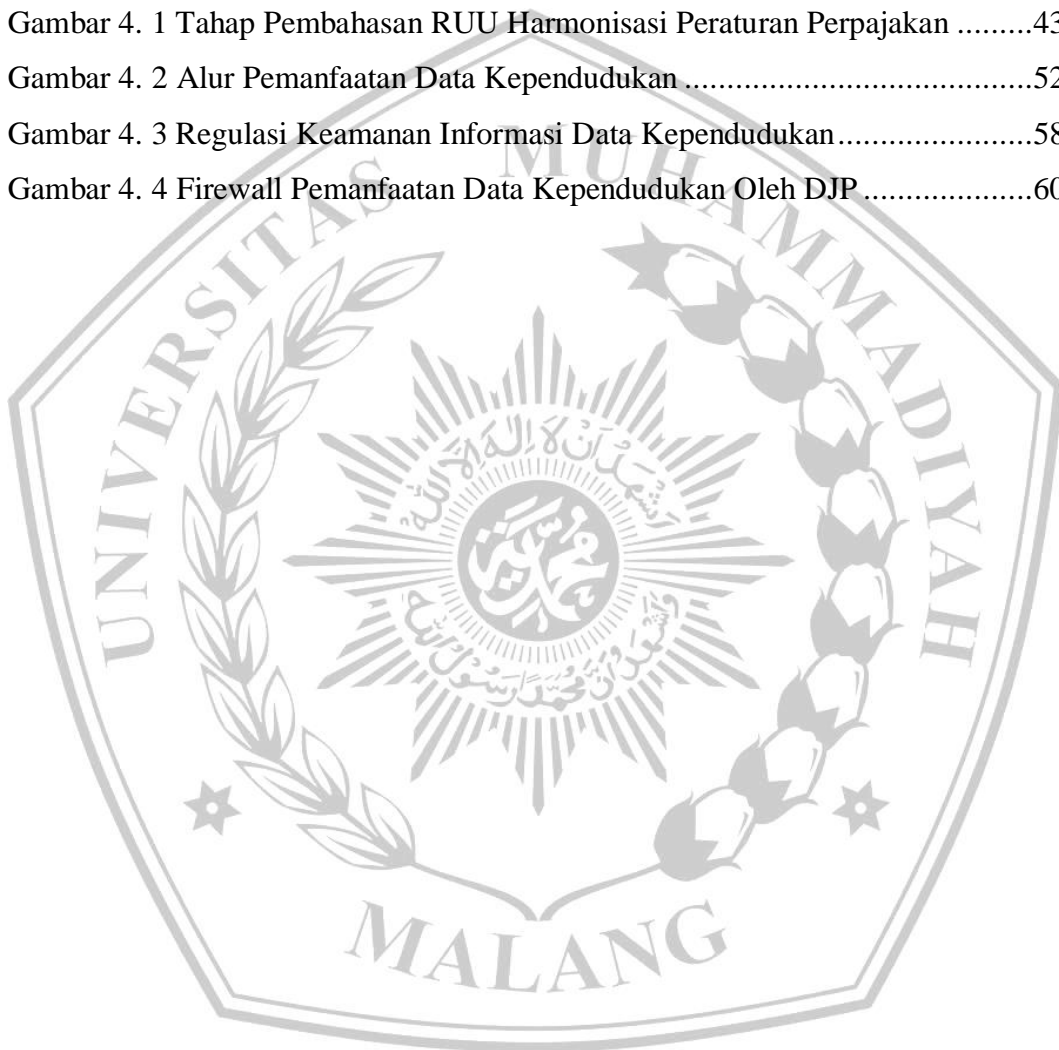
DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Ragam Masalah Utama Pelayanan Publik Tahun 2021	2
Diagram 1. 2 Jumlah Kasus Dugaan Kebocoran Data Tahun 2019-2022	4
Diagram 4. 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2019-2023	73
Diagram 4. 1 Jumlah Pemadanan NIK dan NPWP.....	74
Diagram 4. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	10
Gambar 2. 1 Teori Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn	22
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	26
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri.....	28
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ..	29
Gambar 4. 1 Tahap Pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	43
Gambar 4. 2 Alur Pemanfaatan Data Kependudukan	52
Gambar 4. 3 Regulasi Keamanan Informasi Data Kependudukan.....	58
Gambar 4. 4 Firewall Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh DJP	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahapan Pengembangan E-Government Menurut UNPAN	8
Tabel 3. 1 Sarana dan Prasarana di Kementerian Dalam Negeri	32
Tabel 4. 1 Penerapan Integrasi Data Kependudukan di Negara Lain	45
Tabel 4. 2 Dokumen Perjanjian Kerja Sama Ditjen Dukcapil Dengan DJP.....	50
Tabel 4. 3 Ketentuan Format Baru NPWP Bagi Wajib Pajak.....	65
Tabel 4. 4 Data Kegiatan Sosialisasi Pemadanan NIK dan NPWP.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Adendum Perjanjian Kerja Sama Ditjen Dukcapil dan DJP.....	82
Lampiran 2 Wawancara Direktur IDKN Ditjen Dukcapil.....	82
Lampiran 3 Wawancara Kasubdit Monevdok IDKN Ditjen Dukcapil.....	83



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah , Fitri, A. H., Sari , A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijakan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148-155.
- Arfiansyah, T. R., & Hardiyanto, S. (2022, Mei 21). *Pemerintah Integrasikan Data NIK Jadi NPWP, Apa Fungsinya dan Kapan Diberlakukan?*
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasikan NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 64-71.
- Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 4147-4157.
- Bappenas. (2021). The Role of Satu Data Indonesia to Propel the Practices of Open Government. *OGI News*.
- Chaitra, M. S., Robin, I. A., Martha, Y. F., & Darmawan, I. (2023). Penerapan e-Government dalam Upaya Meningkatkan Kualitas. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 685-693.
- Dahuri, D. (2021, 9 1). *Dibutuhkan Integrasi Data Baik Untuk Perbaiki Sistem Perpajakan*. Diambil kembali dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/429655/dibutuhkan-integrasi-data-baik-untuk-perbaiki-sistem-perpajakan>
- Databoks*. (2021, Desember 20). Retrieved from *Databoks*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/20/persyaratan-berbelit-keluhan-utama-masyarakat-terhadap-pelayanan-publik>
- Databoks*. (2024, Juni 28). Retrieved from *Databoks*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/28/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>
- Dukcapil Kemendagri*. (2024, Juli 1). Retrieved from *Dukcapil Kemendagri*: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/sejarah-kementerian-dalam-negeri>

- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Eka, T. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Community Service Journal*.
- Firdaus, Fahrudin, A., Prasetyo, T. A., Anwari, Z., & Faizin, M. K. (2023). Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 61-70.
- Halimawan, A., Hardenta, A. D., Hayati, A. N., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., . . . Incusy, T. R. (2020). Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. 1-32.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Katadata. (2021, Mei 28). Diambil kembali dari Katadata: <https://katadata.co.id/finansial/makro/60b0c5cae9e0d/sri-mulyani-satu-orang-indonesia-bisa-punya-40-identitas>
- Kemendagri. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- KemenpanRB. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Kemensetneg. (2023, Februari 9). Diambil kembali dari Kemensetneg: https://www.setneg.go.id/baca/index/kemensetneg_gelar_workshop_perpa_jakan_terkait_perubahan_nik_menjadi_npwp
- Khristianto, W. (2007). E-Government: Stages Model, Model Kemitraan dan Kesiapan Organisasi (Suatu Kajian Awal). *Jurnal Administratio*, 1(2), 235-246.
- Kompas. (2024, Juni 3). Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024>

- Kurniati, D. (2022, Oktober 20). *DDTC news*. Diambil kembali dari DDTC news: <https://news.ddtc.co.id/integrasi-nik-sebagai-npwp-djp-ungkap-lagi-manfaatnya-42828>
- Maryuni, S., Sugito, & Sudagung, A. D. (2021). Analisis Kebijakan Satu Data Kalimantan Barat di Era Pemerintahan Gubernur Sutarmidji. 129-144.
- Maulani, W. (2020). Penerapan Electronic Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health di Kota Surabaya). *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 44-54.
- Meilani, R., Tongat, & Esfandiari, F. (2024). Juridical Analysis of The Regulation of NIK As NPWP in The Taxation System in Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, 117-129.
- Natalia, F. (2021, Oktober 7). *DPR Setujui RUU HPP Jadi Undang-Undang, Simak Perubahan UU Perpajakan termasuk KUP*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.tv/bisnis/219308/dpr-setujui-ruu-hpp-jadi-undang-undang-simak-perubahan-uu-perpajakan-termasuk-kup?page=all>
- Ombudsman. (2022). *Laporan Ombudsman Triwulan I*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Pabeta, C. A., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 171-182.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Prayoga, R. (2022, November 20). *Terobosan Mengintegrasikan NIK Sebagai NPWP Mendapat Sambutan Antusias*. Diambil kembali dari Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/3255453/terobosan-mengintegrasikan-nik-sebagai-npwp-mendapat-sambutan-antusias>
- Priantara, I. T. (2018). *Konstruksi Sosial Praktik Perpajakan*. Bali: Udayana University Press.
- Puspita, M. D. (2022, Februari 14). *Good news*. Diambil kembali dari Good news: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/02/14/single-smart-identity-transformasi-digitalisasi-data-penduduk-indonesia-yang-terintegrasikan>

- Putri, D. L., & Kurniawan, R. F. (2022, Mei 22). *NIK Jadi NPWP, Semua Orang Wajib Bayar Pajak?* Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/22/080000965/nik-jadi-npwp-semua-orang-wajib-bayar-pajak->
- Rofita, R. R., & Prasajo, E. (2022). Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 26-37.
- Runtu, M. R. (2021). Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number. *Management Journal*, 53-60.
- Sandi, F. (2022, 07 31). *Survei: NPWP Warga Berpendapatan Rp 4 Juta Nggak Nyampe 50%*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220731174110-4-359960/survei-npwp-warga-berpendapatan-rp4-juta-nggak-nyampe-50>
- Savira, E. M., Katharina, R., Dharmaningtias, D. S., Amrynudin, A. D., & Sejati, S. B. (2022). *Kebijakan Satu Data Indonesia*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Silfia, I. (2024, April 1). *DJP Sebut Pemadanan NIK-NPWP Telah Mencapai 91,7 Persen*. Diambil kembali dari Antara News: <https://www.antarane.ws.com/berita/4039185/djp-sebut-pemadanan-nik-npwp-telah-mencapai-917-persen>
- Tobing, E. G., & Kusmono. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia*, 183-193.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Wasesa, T., Pranoto, H. T., Zuhroh, D., Sutini, & Wiratna. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK-NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. 102-116.